

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA PEMERINTAH
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Sitara C. Annatasia Polohindang¹, Vecky A. J. Masinambow², Ita Pingkan F. Rorong³

¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: spolohindang13@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linear Berganda. Sampel penelitian ini adalah *Time Series* yaitu 15 tahun. Hasil penelitian Pengujian T-Statistik atau parsial menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah, Variabel Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah, Variabel Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah, Dalam Pengujian F-Statistik atau Simultan Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh Terhadap Belanja Pmerintah di Kabupaten Minahasa Utara.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Pemerintah Daerah, Minahasa Utara

ABSTRACT

Regional Original Revenue is the main source of regional financing, therefore the ability to carry out the economy is measured by the amount of contribution made by Regional Original Revenue to the APBD, the greater the contribution that can be made by Regional Original Revenue to the APBD, the less dependence of the regional government on central government assistance. The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Government Expenditures in North Minahasa Regency. Data analysis and hypothesis testing were carried out using the Classical Assumption Test and Multiple Linear Regression. The sample of this research is Time Series which is 15 years. The results of the T-Statistic Test or partial test show that the Regional Original Income Variable Affects Government Expenditure, the General Allocation Fund Variable Affects Government Expenditure, the Special Allocation Fund Variable Affects Government Expenditure, in F-Statistic Testing or Simultaneous Regional Original Income Variable, Funds General Allocations and Special Allocation Funds have an effect on Government Expenditures in North Minahasa Regency

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Local Government Expenditure, North Minahasa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2)

Undang-undang Nomor, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah berkaitan erat dengan desentralisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan kehidupan demokrasi, (Lestari, 2012).

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan program pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara sangatlah penting. Hal itu sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah secara maksimal berupaya melalui serangkaian kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, eksplorasi sumber daya, serta upaya investasi swasta. Untuk penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah Propinsi dan Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan keuangan sendiri. Perkembangan Realisasi Pendapata Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pemerintah dapat ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2006 - 2020

Tahun	PAD	DAU	DAK	BP
2006	41.790.000.000	233.833.000.000	38.527.000.000	264.698.000.000
2007	68.720.000.000	254.840.000.000	91.055.000.000	407.248.000.000
2008	83.620.000.000	255.390.000.000	98.517.000.000	496.925.000.000
2009	11.756.000.000	256.514.000.000	60.473.000.000	347.070.000.000
2010	10.981.000.000	266.587.000.000	39.959.000.000	195.870.000.000
2011	15.720.000.000	307.365.000.000	47.711.000.000	501.041.000.000
2012	18.975.761.465	354.982.999.000	60.593.370.000	586.148.542.736
2013	36.090.808.546	395.558.587.000	51.800.070.000	591.135.454.245
2014	49.283.471.770	425.937.354.000	67.797.590.000	654.834.370.376
2015	50.450.000.000	443.768.000.000	89.987.000.000	785.447.000.000
2016	54.686.152.326	494.834.272.000	197.385.817.430	827.202.655.722
2017	87.681.249.820	490.707.078.000	145.180.892.670	725.125.443.888
2018	101.325.434.691	496.136.006.000	131.791.540.367	767.031.047.271
2019	122.545.000.000	502.434.000.000	143.734.000.000	801.672.000.000
2020	75.169.138.000	472.542.815.000	145.516.386.000	765.094.082.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Minahasa Utara 2021

Dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 – 2008 PAD Kabupaten Minahasa Utara mengalami Peningkatan, Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Minahasa Utara mengalami penurunan. Dan pada tahun 2010 – 2019 PAD Kabupaten Minahasa Utara kembali mengalami peningkatan. Dan Kembali menurun pada tahun 2020.

Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten Minahasa Utara mengalami Peningkatan yang Signifikan pada Tahun 2006 – 2016. Namun pada tahun 2017 DAU Kabupaten Minahasa Utara kembali Menurun dan pada Tahun 2018 – 2019 DAU Kabupaten Minahasa Utara Kembali naik, namun pada tahun 2020 DAU Kabupaten Minahasa Utara Kembali menurun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Minahasa Utara mengalami Fluktuasi, Pada tahun 2006 – 2008 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan, Pada tahun 2009 - 2010 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Utara mengalami penurunan, Pada tahun 2011 – 2012 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Utara mengalami Penurunan. Pada tahun 2013 – 2016 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Utara meningkat, pada tahun 2017 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Utara kembali menurun. Tetapi dari tahun 2017 – 2020 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Utara terus meningkat.

Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 2006 - 2008 Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan, dan kembali menurun pada tahun 2009 – 2010. Pada tahun 2011 - 2016

Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara kembali naik. Pada tahun 2017 kembali menurun, pada tahun 2018 – 2019 kembali naik, namun pada tahun 2020 Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara kembali menurun. Berdasarkan data data di atas , kondisi dan latar belakang dimana Belanja Daerah dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Maka dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis memilih judul ***“Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara.”***

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka masalah dirumuskan : Apakah Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara Parsial dan Simultan Terhadap Belanja Pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. APBD merupakan suatu alokasi penerimaan dan pengeluaran sebagai perencanaan pembangunan dengan mengkoordinasikan semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Anggaran Daerah mempunyai peran penting yaitu sebagai pedoman dan panduan dalam pembangunan Pemerintah Daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. APBD merupakan anggaran sektor publik yang harus diinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat (Ghozali dan Ratmono 2008).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. (Elita dalam Pratiwi, 2007).

2.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. (Halim, 2009).

2.4. Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.5. Penelitian Terdahulu

Joko Untung (2015), dengan Judul Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi Umum, dana alokasi khusus, terhadap belanja Daerah dan dana bagi hasil sebagai pemoderasi Pemerintah kabupaten / kota di provinsi jawa barat Priode tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian dengan metode analisis regresi moderasi (MRA) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil bukan variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan PAD, DAU, DAK dengan Belanja Daerah

Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan judul Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Nurul Hidayah & Hari Setiyawati, (2014) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung . Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series*, yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Minahasa Utara. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara/internet. Data sekunder yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Dana Alokasi Umum (X2) adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). Dana Alokasi Khusus (X3) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). Belanja Daerah (Y) Semua Kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).

Metode Analisis Data Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan dimana rumusnya :

Persamaan Umum :

$$Y = f (X_1 + X_2 + X_3)$$

Persamaan Regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Pemerintah Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

a = Konstanta regresi

b₁, b₂, b₃= Koefisien regresi

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dan nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang digunakan adalah asumsi klasik heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan auto korelasi. dalam literatur ekonometrika dikemukakan berapa asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh suatu model regresi agar model regresi tersebut dapat dipakai. asumsi klasik tersebut adalah bebas heteroskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan bebas auto korelasi.

Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regres panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regres yang baik adalah memiliki distribusai data normal atau mendekati normal. Dalam software Eviews normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jerque-Bera (JB) dan nilai Chi Square tabel. Uji JB didapat dari histogram normality yang akan kita bahas dibawah ini. Hipotesis yang digunakan adalah (Gujarati, 2003):

H_0 : Data tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas $> \alpha$, maka H_0 ditolak

H_1 : Data berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas $< \alpha$, maka H_0 diterima.

Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *varians* dan *residual* dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dan *residual* dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*. Dan jika *varians* berbeda, disebut *heteroskedastisitas*. Uji *heteroskedastisitas* dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji *scatter plot*. Apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Asumsi Klasik Multikolinearitas

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear baik yang pasti maupun yang mendekati pasti diantara variabel X, konsekuensi dan multikolinearitas yaitu bila ada kolinearitas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tentu ada kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresinya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien Regresinya adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sedang hasilnya nilai populasi dan koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) > 10 .

Asumsi Klasik Autokorelasi

Satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik ialah bahwa tidak ada autokorelasi, yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu (*data time series*) dan data silang waktu (*data crossection*). Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan Uji statistic Durbin Waston.

H_0 : Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negative

H_a : Ada autokorelasi baik positif maupun negative

Jika dilakukan dengan pengujian tes hipotesis Durbin Waston adalah:

$d < d_l$ = menolak H_0 $d_l \leq d \leq d_u$ = pengujian tidak meyakinkan $d > 4 - d_l$

= menolak H_0 $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = pengujian ragu-ragu

$d_u < d < 4 - d_u$ = menerima H_0

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Normalitas Grafik 1. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

Jarque-Bera = 2.880057

Probability = 0.236921

Sumber : Pengolahan Data Dengan Eviews 10

Dari hasil pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa data pada jangka terdistribusi Normal karena nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,236921 > 0,05$) yang artinya data terdistribusi Normal.

Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Table 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

R-squared = 12.34333
Prob. Chi-Square = 0.1365

Sumber : Pengolahan Data Dengan Eviews 10

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 12.34333. Nilai Probabilitas Chi-squares sebesar 0.1365. Karena nilai kritis Probabilitas Chi-squares lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Asumsi Klasik Multikolinearitas Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
C	NA
Pendapatan Asli Daerah	2.094186
Dana Alokasi Umum	1.751200
Dana Alokasi Khusus	2.534448

Sumber : Pengolahan Data Eviews 10

Dari hasil pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel independen tidak ada masalah, karena nilai centered VIF masing-masing variabel tidak lebih besar daripada 10.

Asumsi Klasik Autokorelasi Tabel 4. Uji Autokorelasi

R-squared = 2.119272
Prob. Chi-Square = 0.3466

Sumber : Pengolahan Data Eviews 10

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 2.119272 nilai probabilitas chi squares sebesar 0.3466. Karena nilai probabilitas chi squares lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda Tabel 5. Kofisien Determinasi R^2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.660418	2.336690	-1.138541	0.2791
X1	0.076640	0.105507	0.726391	0.4828
X2	1.013599	0.260076	3.897323	0.0025
X3	0.170592	0.186978	0.912366	0.3811
R-squared	0.812057	F-statistic		15.84276
Adjusted R-squared	0.760799	Prob(F-statistic)		0.000263

Sumber : Pengolahan Data Eviews 10

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Eviews 10 diperoleh koefisien Determinasi Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.812057 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Pemerintah sebesar 81,21%, sedangkan sisanya 18,79% dijelaskan oleh variabel di luar model lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji t-Statistik

Persamaan Regresi dari Penelitian ini adalah : $Y = -2.660418 + 0.076640X_1 + 1.013599X_2 + 0.170592X_3 + e$

Nilai Konstanta sebesar -2.660418 mengandung arti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1%, maka Belanja Pemerintah akan berkurang sebesar 2.660418 Persen.

Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.076640 mengandung arti bahwa jika Variabel Independen lain nilainya 0 dan Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1% maka Belanja Pemerintah meningkat sebesar 0.076640 Persen.

Nilai Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum sebesar 1.013599 mengandung arti bahwa jika Variabel Independen lain nilainya 0 dan Dana Alokasi Umum bertambah sebesar 1%, maka Belanja Pemerintah bertambah sebesar 1.013599 Persen.

Nilai Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0.170592 mengandung arti bahwa jika Variabel Independen lain nilainya 0 dan Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1%, maka Belanja Pemerintah meningkat sebesar 0.170592 Persen.

Nilai t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah adalah 0.726391, Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum adalah 3.897323, dan Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Khusus adalah 0.912366. Nilai t_{tabel} adalah 0.69745 yang diperoleh dengan Alpha 0.05 dan df sebesar yakni (15-3-1), pada sisi lain nilai signifikansinya (sig) Pendapatan Asli Daerah 0,4828, Dana Alokasi Umum 0.0025 dan Dana Alokasi Khusus 0.3811. Variabel Pendapatan Asli Daerah nilai t_{hitung} lebih Besar dari nilai t_{tabel} , dan nilai signifikansinya lebih Besar dari Alpha, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap Belanja Pemerintah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.

Variabel Dana Alokasi Umum nilai t_{hitung} lebih Besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikansinya lebih kecil dari Alpha, Maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Pemerintah.

Variabel Dana Alokasi Khusus nilai t_{hitung} lebih Besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikansinya lebih Kecil dari Alpha, Maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh secara parsial terhadap Belanja Pemerintah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.

Uji F-Statistik

Nilai F-statistik yang diperoleh 15.84276 dengan signifikansi 0,000263. Nilai F table adalah 3.49 yang diperoleh dengan Alpha 0,05 dan df (15= jumlah sampel – 3 = variable bebas). Nilai F statistik lebih besar dari F table, artinya bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Belanja Pemerintah.

Pembahasan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh t_{hitung} lebih Besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana pada penelitian ini ditemukan pengaruh positif tapi tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara. Tidak berpengaruh signifikan

dapat dikarenakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh, PAD rendah dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Untung (2015), Meylan F. Lukas (2018), Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Nurul Hidayanti & Hari Setiyawati (2014), Rifando Jecky Tololiu (2018), Dewi Irma Septiyani Paulus (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Pemerintah. Dan Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Eko Adventino (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan program pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara sangatlah penting. Hal itu sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah secara maksimal berupaya melalui serangkaian kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, eksplorasi sumber daya, serta upaya investasi swasta. Untuk penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah Propinsi dan Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan keuangan sendiri.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah

Dana Alokasi Umum diperoleh t_{hitung} lebih Besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana pada penelitian ini ditemukan pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara. Alasan Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif karena pada saat Dana Alokasi Umum tinggi maka belanja daerah tinggi, hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Untung (2015), Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Nurul Hidayah & Hari Setiawati (2014), Rifando Jecky Tololiu (2018), Dewi Irma Septiyani Paulus (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pemerintah

Dana Alokasi Khusus diperoleh t_{hitung} lebih Besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana pada penelitian ini ditemukan pengaruh positif tapi tidak signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara. Tidak berpengaruh signifikan dapat dikarenakan nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah

sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Irma Septiyani Paulus (2017), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Untung (2015, Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel dependen yaitu variabel Belanja Pemerintah membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000263, nilai ini jauh lebih kecil dari α 0,05, dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti secara simultan seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan secara simultan/bersama terhadap Belanja Pemerintah di Kabupaten Minaasa Utara.

PENUTUP Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh tetapi tidak Signifikan terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Dana Alokasi Umum Berpengaruh dan Signifikan terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Dana Alokasi Umum Berpengaruh tetapi tidak Signifikan terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh secara simultan dan Signifikan terhadap Belanja Pemerintah Di Kabupaten Minahasa Utara.

Saran

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang belum dicantumkan dalam penelitian ini misalnya saja variabel, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, PDRB, dan Kebijakan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat

(2).

- _____ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- _____ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 156 ayat 1
- _____ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan.

Bastian, (2002), Sistem Akumulasi Sektor Publik; Jakarta; Salemba empat.

Elita dalam Pratiwi, (2007), Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

Ghozali dan Ratmono 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar, Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Halim, 2007 tentang Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta. Salemba Empat.

<https://minahasakab.bps.go.id/>

Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana alokasi Umum, Dana alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah Dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Priode Tahun 2010-2014.

<https://media.neliti.com/media/publications/54987-ID-pengaruh-pendapatan-asli-daerahdana-alo.pdf> Volume 1 Nomor 2 Mei 2017

Kusumadewi dan Rahman (2007) Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia.

<https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/390> Vol 11, No 1 (2007)

Lestari, 2012. Psikologi Keluarga. Jakarta: Kencana

Lestari, Sri. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga. Jakarta: Kencana

Mardiasmo, 2002 Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. <http://journal.ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/549> Vol. 18 No. 1 (2014): January 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1)

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.